

**STRATEGI PENATAAN RUANG DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MITIGASI BENCANA DI
KAWASAN RAWAN GUNUNGAPI KARANGASEM BALI : REVIEW LITERATUR
(2020-2024)**

Awellya Novia Ramadanisa¹ Johana Marsela Zalianti² Yusnimar Yusri³
Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Riau Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail : awelianovia@gmail.com¹, zaliantijohanamarsela@gmail.com²,
yusnimaryusri2@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana di kawasan rawan Gunungapi Karangasem, Bali. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap empat artikel ilmiah yang membahas kebijakan pariwisata, zonasi kawasan rawan bencana, komunikasi kebijakan, dan kesesuaian lahan permukiman. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata merupakan strategi efektif dan adaptif untuk diterapkan di wilayah KRB II karena tidak menimbulkan kerentanan tinggi serta mendorong partisipasi masyarakat lokal. Penataan ruang berbasis zonasi risiko (KRB I–III) menjadi dasar pembatasan aktivitas, khususnya di KRB III yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Infrastruktur mitigasi seperti jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara (TES) menjadi komponen penting dalam perencanaan. Selain itu, komunikasi kebijakan pariwisata perlu diperkuat agar promosi tetap relevan. Kajian ini menekankan pentingnya integrasi antara ruang, kebijakan, dan mitigasi.

Kata kunci: Penataan Ruang, Mitigasi Bencana, Pariwisata, Karangasem, Gunungapi Agung.

Abstract

This study aims to examine spatial planning strategies and local government policies in the development of disaster-mitigation-based tourism in the disaster-prone area of Mount Agung, Karangasem, Bali. The method employed is a literature review with a qualitative descriptive approach based on four scholarly articles discussing tourism policy, disaster-prone area zoning, policy communication, and residential land suitability. The findings indicate that the development of agro-tourism is an effective and adaptive strategy, particularly suitable for KRB II zones, as it minimizes vulnerability and encourages local community participation. Spatial planning based on risk zoning (KRB I–III) serves as the foundation for activity restrictions, especially in KRB III, which is designated as a protected area. Mitigation infrastructures such as evacuation routes and temporary evacuation shelters (TES) are essential components of planning. Furthermore, policy communication in tourism needs to be

strengthened to maintain relevance. This review highlights the importance of integrating spatial planning, policy, and mitigation strategies.

Keywords: Spatial Planning, Disaster Mitigation, Tourism, Karangasem, Mount Agung.

PENDAHULUAN

Kabupaten Karangasem, Bali, merupakan salah satu wilayah dengan potensi pariwisata budaya dan alam yang sangat tinggi. Namun, kawasan ini juga termasuk dalam zona rawan bencana akibat aktivitas Gunungapi Agung yang masih aktif hingga saat ini. Letusan besar yang terjadi pada tahun 2017 menjadi pengingat penting bahwa pembangunan, termasuk sektor pariwisata, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip mitigasi bencana dan ketahanan wilayah. Oleh karena itu, strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah di wilayah ini menjadi isu krusial yang perlu ditelaah secara komprehensif. Penataan ruang yang tepat berbasis zonasi Kawasan Rawan Bencana (KRB) menjadi salah satu upaya mitigatif yang paling esensial. Penelitian oleh Rizki Kirana Yuniartanti (2021) menunjukkan bahwa zona KRB III harus ditetapkan secara ketat sebagai kawasan lindung tanpa aktivitas pariwisata atau permukiman. Sementara itu, KRB II dan I masih dapat dimanfaatkan secara terbatas dengan penerapan infrastruktur mitigasi seperti jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara (TES). Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis risiko dan peraturan yang kuat. Selain itu, Ni Luh Jaya Anggreni dan Putu Indah Dianti Putri (2024) melakukan analisis spasial terhadap kesesuaian lahan permukiman di Kecamatan Rendang, Karangasem. Hasilnya mengindikasikan bahwa tidak semua wilayah di kawasan tersebut aman untuk pengembangan, termasuk pariwisata. Beberapa desa dengan skor kerentanan tinggi seperti Besakih, Penempatan, dan Menanga seharusnya tidak dikembangkan sebagai kawasan wisata atau permukiman karena berisiko tinggi terhadap erupsi. Temuan ini memperkuat urgensi peran data spasial dan analisis risiko dalam penataan ruang. Dalam konteks pengembangan pariwisata, Putri Kusuma Sanjiwani dan Luh Putu Kerti Pujani (2020) menekankan bahwa agrowisata merupakan alternatif ideal untuk wilayah-wilayah rawan bencana seperti Desa Ban. Bentuk wisata ini bersifat tidak menetap, tidak melibatkan aktivitas menginap, dan dapat dibangun dengan struktur semi permanen yang lebih aman. Lebih penting lagi, model ini memberdayakan masyarakat lokal dan mendukung perekonomian setempat melalui pengolahan produk lokal seperti mete, sebagaimana diperkuat oleh peran East Bali Cashews di wilayah tersebut. Namun, pengembangan pariwisata yang aman tidak hanya bergantung pada

infrastruktur dan perencanaan fisik, tetapi juga komunikasi yang efektif. Studi oleh Ketut Chintya Adnyaswari dan Reni Nuraeni (2020) mengungkapkan bahwa strategi komunikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem pasca-erupsi belum optimal. Meskipun berbagai kegiatan promosi seperti festival budaya telah dilakukan, kunjungan wisatawan masih mengalami penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih terarah dan responsif terhadap kondisi kebencanaan.

Pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana di Karangasem tidak hanya bergantung pada kebijakan spasial dan struktur regulatif, tetapi juga memerlukan pendekatan komunikasi yang strategis dan partisipasi masyarakat yang aktif. Dalam hal ini, hasil penelitian Ketut Chintya Adnyaswari dan Reni Nuraeni (2020) memperlihatkan bahwa komunikasi publik oleh Dinas Pariwisata Karangasem pasca-erupsi Gunung Agung masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal efektivitas promosi dan pemulihan citra destinasi. Promosi yang mengandalkan festival budaya dan media konvensional belum cukup mengembalikan kepercayaan wisatawan. Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi krisis dan ketidakpastian yang melekat pada kawasan rawan bencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengembangan narasi pariwisata yang menekankan aspek keamanan, keberlanjutan, dan kesiapsiagaan menjadi sangat penting. Komunikasi pariwisata harus bersifat edukatif dan mampu membangun persepsi publik bahwa pariwisata di Karangasem telah dikelola secara aman dan profesional. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih erat antara Dinas Pariwisata dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menyusun pesan-pesan kebijakan yang bersifat responsif dan adaptif terhadap dinamika kebencanaan. Komunikasi berbasis mitigasi ini bukan hanya menyasar wisatawan, tetapi juga pelaku industri lokal dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Lebih lanjut, integrasi antara data spasial, strategi komunikasi, dan kebijakan pembangunan memungkinkan munculnya pendekatan yang lebih responsif dan inovatif. Sebagaimana diuraikan dalam artikel Ni Luh Jaya Anggreni dan Putu Indah Dianti Putri (2024), penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat dimaksimalkan tidak hanya untuk perencanaan ruang, tetapi juga sebagai alat visual dalam menyampaikan informasi mitigasi kepada publik. Dengan peta risiko digital yang interaktif, wisatawan dan masyarakat lokal dapat mengakses informasi real-time mengenai status kawasan dan prosedur evakuasi. Kesesuaian antara strategi komunikasi dan kebijakan spasial ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan literasi kebencanaan di tingkat masyarakat.

Pemerintah daerah harus secara aktif melibatkan komunitas lokal, tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai mitra dalam menyusun dan menjalankan program pengembangan pariwisata berbasis mitigasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatif yang telah diterapkan dalam pengembangan agrowisata di Desa Ban, Karangasem, yang tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang unik, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* yang bertujuan untuk mengkaji dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana di kawasan rawan Gunungapi Karangasem, Bali. Literature review dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik, kebijakan, serta pendekatan spasial yang telah dilakukan di daerah rawan bencana, khususnya melalui studi-studi terkini.

Strategi Pencarian Literatur

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa database akademik terkemuka seperti Google Scholar, ProQuest, ScienceDirect, dan ResearchGate. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci sebagai berikut: “*penataan ruang*”, “*mitigasi bencana*”, “*pariwisata*”, “*Karangasem*”, dan “*Gunungapi Agung*”. Artikel yang ditelusuri dibatasi pada periode tahun 2020–2024, guna menjamin relevansi dan kebaruan data.

Kriteria Inklusi

- a. Artikel penelitian nasional dan internasional yang membahas topik penataan ruang, mitigasi bencana, serta pengembangan pariwisata di kawasan rawan bencana Gunungapi Karangasem.
- b. Diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2024.
- c. Merupakan artikel penelitian empiris (research articles), baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Artikel tersedia secara akses penuh (full text) dan mengandung informasi metodologis yang memadai untuk dianalisis.

Kriteria Eksklusi

- a. Artikel yang tidak secara spesifik membahas kawasan Gunungapi Karangasem atau tidak relevan dengan topik kebijakan penataan ruang dan pariwisata berbasis mitigasi bencana.
- b. Artikel yang diterbitkan di luar rentang tahun 2020–2024.
- c. Artikel non-ilmiah, editorial, opini, atau review non-terstruktur.

Tahapan Seleksi dan Sintesis Data

- a. Proses seleksi dilakukan dalam beberapa tahapan:
Screening judul dan abstrak untuk menilai relevansi awal terhadap fokus penelitian.
- a. Evaluasi isi penuh (full text) untuk mengonfirmasi kelayakan artikel berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi.
- b. Artikel terpilih dianalisis dengan pendekatan tematik berdasarkan fokus penelitian masing-masing, seperti: kebijakan pemerintah daerah (Sanjiwani & Pujani, 2020), zonasi dan penataan ruang (Yuniartanti, 2021), komunikasi pariwisata (Adnyaswari & Nuraeni, 2020), serta kesesuaian lahan berbasis spasial (Anggreni & Putri, 2024).

HASIL

Tabel 1.Hasil Review Artikel Tentang Strategi Penataan Ruang dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana di Kawasan Rawan Gunungapi Karangasem, Bali.

N o	Penulis	Tujuan	Metode	Sampel	Variabel	Hasil
1.	Putri Kusuma Sanjiwani dan Luh Putu Kerti Pujani (2020)	Penelitian ini mengkaji kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan	Jenis: Penelitian hukum empiris Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi	Lokasi: Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata, Potensi agrowisata	Pengembangan agrowisata (khususnya kacang mete) adalah pilihan terbaik di

		pariwisata di Desa Ban, kawasan rawan bencana Gunung Agung, Kabupaten Karangase m. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan agrowisata adalah bentuk wisata ideal di wilayah rawan bencana untuk meminimal kan risiko korban jika terjadi letusan.	Analisis: Teknik analisis hukum dan evaluasi hukum Pendekatan teori: Teori otoritas, teori fungsional, konsep kebijakan, konsep agrowisata, prinsip desentralisasi		sebagai alternatif pariwisata aman di daerah rawan bencana, Resiko dan dampak erupsi terhadap sektor pariwisata, Pemberdaya an masyarakat lokal melalui kegiatan agrowisata	wilayah KRB II. Bangunan agrowisata disarankan berbentuk semi permanen dan ramah lingkungan (misalnya dari bambu). Kegiatan wisata dibatasi pada jam operasional 8 jam, tanpa aktivitas menginap. Agrowisata lebih adaptif terhadap potensi bencana dibandingkan jenis wisata lainnya.
--	--	---	--	--	--	--

						Melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal melalui kelembagaan seperti kelompok tani. Produk lokal seperti mete bisa dikembangkan menjadi oleh-oleh khas wisata. Pabrik East Bali Cashews berperan penting dalam mendukung potensi industri dan pariwisata lokal.
--	--	--	--	--	--	---

2.	Rizki Kirana Yuniartanti (2021)	Penelitian ini membahas penataan ruang di kawasan rawan bencana Gunungapi Agung di Kabupaten Karangasem, Bali. Tujuannya adalah merumuskan rekomendasi pola ruang dan pengembangan infrastruktur mitigasi berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penelitian menekankan	Gabungan kualitatif dan kuantitatif. Alat analisis: Sistem Informasi Geografis (SIG) Studi literatur dan praktik baik Kebijakan/peraturan pemerintah terkait	kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Agung, khususnya di Kabupaten Karangasem, meliputi Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem, Rendang, dan Selat.	-Tingkat kerawanan bencana (KRB I, II, III) - Pemanfaatan ruang sesuai zonasi KRB -Jenis infrastruktur mitigasi (jalur evakuasi, TEA, TES) -Kegiatan ekonomi (pariwisata dan pertambangan) dan syarat pembatasannya -Regulasi yang mendasari	KRB III (radius 6 km): Diatur sangat ketat sebagai kawasan lindung, tidak diperbolehkan kegiatan permukiman baru, pertambangan dan pariwisata dibatasi dan harus memperhatikan mitigasi. KRB II dan I: Masih diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dan pariwisata dengan syarat tertentu.
----	---------------------------------	--	--	---	--	--

		pentingnya kesiapsiagaan pra-bencana dibandingkan rehabilitasi pasca-bencana yang lebih mahal.			(UU No. 24 & 26 Tahun 2007, Perda RTRW Karangase m)	
3.	Ketut Chintya Adnyaswari & Reni Nuraeni (2020)	Untuk mengetahui strategi komunikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Karangase m dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Desa Tenganan Pegringsing an pasca erupsi Gunung Agung.	Kualitatif deskriptif	Tiga informan (stakehold er pariwisata Karangase m), dokumenta si, dan observasi lapangan	Strategi komunikasi (analisis & riset, perumusan kebijakan, perencanaan a n pelaksanaan , kegiatan komunikasi)	Strategi komunikasi seperti Tenganan Festival dan promosi media telah dilakukan, tetapi belum berhasil meningkatka n kunjungan wisata secara signifikan; jumlah wisatawan menurun dari 32.262 (2017) menjadi

						24.937 (2018).
4.	Ni Luh Jaya Anggreni & Putu Indah Dianti Putri (2024)	Menganalisis kesesuaian lahan permukiman di kawasan rawan erupsi Gunung Agung, Kecamatan Rendang, Karangasem.	Deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial berbasis GIS dan skoring	Data spasial wilayah Kecamatan Rendang (6 desa): Penempatan, Besakih, Menanga, Rendang, Nongan, Pesaban	Kesesuaian lahan berdasarkan : jenis tanah, kemiringan lereng, potensi banjir, dan kerentanan terhadap erupsi gunungapi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Penempatan, Besakih, dan Menanga dikategorikan tidak sesuai untuk kawasan permukiman karena memiliki tingkat risiko tinggi terhadap erupsi gunung berapi, dengan total skor 131. Sementara itu, Desa Rendang, Nongan, dan Pesaban dikategorikan sesuai

						untuk kawasan permukiman karena memiliki tingkat risiko rendah, dengan total skor 126. Tiga desa pertama yang masuk dalam kategori tidak sesuai menunjukkan perlunya perhatian serius dalam perencanaan tata ruang wilayah, karena keberadaan permukiman di wilayah tersebut berpotensi membahayakan keselamatan penduduk
--	--	--	--	--	--	--

						jika terjadi erupsi Gunung Agung. Hasil ini menjadi dasar penting dalam upaya mitigasi risiko bencana dan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi relokasi penduduk dari wilayah yang berisiko tinggi ke lokasi yang lebih aman.
--	--	--	--	--	--	--

PEMBAHASAN

Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Agung di Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan dinamika tinggi antara kebutuhan pembangunan, khususnya sektor pariwisata, dan tuntutan mitigasi risiko bencana. Letusan Gunung Agung yang terjadi beberapa tahun lalu memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas sosial ekonomi, termasuk pariwisata. Oleh karena itu, pendekatan penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah

menjadi krusial dalam mengelola dan mengembangkan kawasan ini secara berkelanjutan dan aman. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Kusuma Sanjiwani dan Luh Putu Kerti Pujani (2020) menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata merupakan strategi ideal untuk diterapkan di wilayah KRB, khususnya di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem. Agrowisata dinilai lebih adaptif terhadap kondisi kebencanaan karena kegiatan wisata tidak bersifat menetap, dan bangunan yang digunakan bersifat semi permanen dan ramah lingkungan seperti penggunaan bambu. Pemilihan agrowisata juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi produktif. Kelompok tani dan pabrik lokal seperti East Bali Cashews berperan penting dalam membentuk sinergi antara produksi pertanian dan kegiatan pariwisata. Strategi ini menciptakan integrasi antara pengembangan ekonomi, perlindungan terhadap risiko bencana, dan pelestarian budaya lokal.

Di sisi lain, analisis spasial terhadap kesesuaian lahan permukiman di Kecamatan Rendang yang dilakukan oleh Ni Luh Jaya Anggreni dan Putu Indah Dianti Putri (2024) menegaskan pentingnya memperhatikan aspek biofisik dalam penataan ruang. Tiga desa di Kecamatan Rendang yaitu Penempatan, Besakih, dan Menanga dinyatakan tidak layak untuk permukiman karena risiko erupsi tinggi, sedangkan Rendang, Nongan, dan Pesaban dinilai lebih aman untuk dikembangkan. Hasil tersebut menjadi dasar argumentatif bahwa tidak semua wilayah di kawasan rawan bencana dapat dijadikan lokasi pengembangan pariwisata atau permukiman. Oleh karena itu, strategi penataan ruang harus mempertimbangkan zonasi KRB secara ketat. Penerapan prinsip mitigasi struktural dan non-struktural menjadi keharusan dalam perencanaan pembangunan di wilayah seperti Karangasem. Lebih lanjut, Rizki Kirana Yuniartanti (2021) menyampaikan bahwa pola ruang dan pengembangan infrastruktur mitigasi harus didesain berdasarkan klasifikasi KRB I, II, dan III. KRB III harus menjadi kawasan lindung tanpa aktivitas pariwisata atau permukiman. Di sisi lain, KRB II dan I dapat difungsikan secara terbatas dengan pengawasan dan teknologi mitigasi seperti jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara (TES), dan sistem peringatan dini (TEWS). Dengan demikian, kebijakan penataan ruang yang sensitif terhadap kerawanan bencana adalah fondasi utama. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi pijakan hukum yang mendasari pembatasan aktivitas manusia di kawasan dengan risiko tinggi.

Pemerintah daerah Karangasem perlu memperkuat implementasi regulasi tersebut melalui pengawasan ketat dan sosialisasi yang efektif.

Aspek komunikasi kebijakan juga tidak kalah penting. Ketut Chintya Adnyaswari dan Reni Nuraeni (2020) dalam penelitiannya mencatat bahwa strategi komunikasi Dinas Pariwisata Karangasem, seperti promosi melalui festival budaya dan media, belum berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisata secara signifikan pasca-erupsi Gunung Agung. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi krisis dan promosi pariwisata berbasis mitigasi perlu diperkuat lagi. Kegagalan komunikasi bukan semata soal konten, tetapi juga soal waktu dan segmentasi audiens. Dalam konteks kawasan rawan bencana, pesan-pesan kebijakan dan promosi pariwisata harus disampaikan dengan narasi kesiapsiagaan, keberlanjutan, dan keamanan bagi wisatawan serta masyarakat lokal. Dengan kata lain, pemasaran destinasi wisata di Karangasem harus bersifat edukatif dan meyakinkan. Strategi penataan ruang dan kebijakan pembangunan di wilayah KRB tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat lokal. Pendekatan partisipatif, seperti yang terlihat dalam pengembangan agrowisata, perlu diperluas ke wilayah lain yang berpotensi wisata namun berisiko bencana. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pelatihan kesiapsiagaan, edukasi kebencanaan, serta kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Dari sisi kelembagaan, penting bagi Pemkab Karangasem untuk membentuk tim lintas sektor yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, serta akademisi dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan kawasan rawan bencana agar tidak hanya menekan risiko, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata aman. Integrasi antara sistem informasi geografis (SIG), data spasial KRB, potensi wisata, dan pemetaan sosial ekonomi penduduk menjadi alat yang sangat efektif dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah daerah bisa merencanakan dan mengembangkan zona pariwisata adaptif bencana secara lebih presisi dan akuntabel. Keseluruhan hasil penelitian dalam dokumen ini mengarah pada kesimpulan bahwa penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah di kawasan rawan bencana Gunungapi Karangasem harus berpijak pada prinsip mitigasi risiko, pemberdayaan lokal, dan keberlanjutan. Pendekatan agrowisata, pemanfaatan teknologi spasial, zonasi KRB, dan strategi komunikasi terpadu adalah kunci untuk memastikan pengembangan pariwisata tidak menjadi ancaman baru, melainkan solusi yang adaptif dan produktif. Kabupaten Karangasem di Bali merupakan wilayah dengan kekayaan alam yang luar biasa, namun juga menyimpan risiko tinggi karena keberadaan Gunung Agung sebagai salah satu gunungapi aktif di Indonesia. Letusan yang terjadi beberapa tahun lalu telah memberikan dampak besar terhadap

sektor pariwisata, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam konteks tersebut, strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah menjadi aspek yang sangat penting guna menjamin keberlanjutan pembangunan pariwisata berbasis mitigasi bencana di kawasan rawan gunungapi. Penataan ruang tidak lagi cukup hanya memperhatikan potensi ekonomi, namun juga harus secara ketat mempertimbangkan risiko bencana yang nyata dan berulang. salah satu pendekatan yang dinilai efektif dan adaptif di kawasan rawan bencana adalah pengembangan agrowisata. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Putri Kusuma Sanjiwani dan Luh Putu Kerti Pujani (2020), agrowisata memberikan solusi yang fleksibel dan berkelanjutan.

Di Desa Ban, Kecamatan Kubu, kegiatan pariwisata dikembangkan dengan memanfaatkan potensi pertanian lokal dan menerapkan struktur bangunan semi permanen yang ramah lingkungan. Hal ini memungkinkan pengelolaan wisata yang tetap produktif namun tetap responsif terhadap kemungkinan bencana. Tidak hanya itu, model agrowisata ini juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan kelompok tani dan unit usaha lokal seperti East Bali Cashews yang berhasil mengintegrasikan pertanian dan pariwisata menjadi satu kesatuan ekonomi yang tangguh terhadap bencana. penataan ruang di wilayah rawan bencana, khususnya di Kecamatan Rendang, menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis analisis spasial. Hasil penelitian Ni Luh Jaya Anggreni dan Putu Indah Dianti Putri (2024) menegaskan bahwa tidak semua wilayah dapat dijadikan lokasi pembangunan permukiman atau pariwisata. Tiga desa seperti Penempatan, Besakih, dan Menanga dikategorikan tidak layak huni karena tergolong dalam KRB III, sementara wilayah seperti Rendang, Nongan, dan Pesaban lebih memungkinkan untuk dikembangkan secara terbatas. Dengan demikian, rencana tata ruang harus dibangun berdasarkan klasifikasi zona KRB dan mematuhi prinsip mitigasi struktural maupun non-struktural. Pentingnya klasifikasi zona KRB juga diperkuat oleh penelitian Rizki Kirana Yuniartanti (2021) yang menyebutkan bahwa KRB III harus difungsikan sebagai kawasan lindung tanpa aktivitas manusia, sementara zona KRB II dan KRB I masih bisa dimanfaatkan secara terbatas dengan prasyarat penyediaan infrastruktur mitigasi yang memadai seperti jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara (TES), dan sistem peringatan dini (TEWS). Kebijakan semacam ini juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang secara eksplisit mengatur pembatasan aktivitas manusia di wilayah berisiko tinggi. namun demikian, penataan ruang yang baik tidak akan efektif tanpa didukung oleh strategi komunikasi kebijakan yang

kuat. Berdasarkan penelitian Ketut Chintya Adnyaswari dan Reni Nuraeni (2020), strategi komunikasi Dinas Pariwisata Karangasem setelah erupsi belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata secara signifikan. Promosi yang dilakukan melalui festival budaya dan media sosial belum cukup meyakinkan wisatawan tentang keamanan dan kesiapan destinasi. Dalam konteks kawasan rawan bencana, pesan-pesan promosi harus dibangun dengan narasi kesiapsiagaan, keberlanjutan, dan keamanan. Komunikasi publik perlu diarahkan tidak hanya untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan bahwa pariwisata di Karangasem dikelola secara bertanggung jawab dan berbasis mitigasi risiko. Dalam implementasi kebijakan pembangunan di kawasan rawan bencana, peran serta masyarakat lokal tidak dapat diabaikan. Pendekatan partisipatif sebagaimana terlihat dalam pengembangan agrowisata harus diperluas ke wilayah lain yang memiliki potensi wisata namun berada dalam zona berisiko.

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pelatihan kesiapsiagaan, edukasi kebencanaan, serta membentuk kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Lebih jauh, pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, akademisi, dan tokoh masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan bersifat integratif dan adaptif terhadap kondisi lokal dalam mendukung perencanaan berbasis bukti, pemanfaatan teknologi spasial seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat diperlukan. Melalui integrasi data spasial kawasan rawan bencana, potensi wisata, dan kondisi sosial ekonomi penduduk, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan akuntabel. Hal ini juga memungkinkan perencanaan zona wisata berbasis mitigasi yang presisi, sehingga tidak hanya menghindari risiko, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan demikian, strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di kawasan rawan Gunungapi Karangasem harus dirancang secara holistik dan berbasis risiko. Pendekatan agrowisata, pemetaan spasial, zonasi KRB, penguatan komunikasi publik, serta partisipasi masyarakat merupakan elemen-elemen kunci dalam membangun pariwisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga aman dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Strategi penataan ruang dan kebijakan pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pengembangan pariwisata berbasis mitigasi bencana di kawasan rawan Gunungapi

Karangasem, Bali. Penataan ruang yang berbasis zonasi risiko bencana (KRB I, II, III) menjadi dasar dalam menentukan jenis kegiatan yang dapat dikembangkan secara aman. Agrowisata terbukti sebagai bentuk pariwisata adaptif yang relevan di wilayah berisiko, dengan keunggulan berupa fleksibilitas, keterlibatan masyarakat lokal, dan potensi ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah juga perlu didukung strategi komunikasi efektif, regulasi spasial yang ketat, serta pendekatan partisipatif lintas sektor. Penerapan teknologi spasial seperti SIG menjadi alat bantu penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mencapai keberlanjutan, pengembangan pariwisata di kawasan rawan bencana harus terintegrasi dengan upaya mitigasi risiko, edukasi masyarakat, serta perlindungan lingkungan, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi sarana pemulihan ekonomi, tetapi juga instrumen ketahanan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyaswari, K. C., & Nuraeni, R. (2020). *Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Pasca Erupsi Gunung Agung*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.
- Anggreni, N. L. J., & Putri, P. I. D. (2024). *Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Rawan Erupsi Gunung Agung Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem*. Jurnal Geografi dan Perencanaan Wilayah, 10(1), 45–56.
- Sanjiwani, P. K., & Pujani, L. P. K. (2020). *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali*. Jurnal Ilmiah Pariwisata, 25(2), 133–140. Universitas Udayana.
- Yuniartanti, R. K. (2021). *Konsep Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Agung di Kabupaten Karangasem, Pulau Bali*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021: Inovasi dalam Percepatan Penataan Ruang di Indonesia (hlm. 95–101). ISBN: 978-602-5872-98-3.